**DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, S. J. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar.

Abramowitz, A. I. (2010). The Disappearing Center: Engaged Citizens, Polarization, and American Democracy. Yale University Press.

Ali, K. A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4) 602-614.

Amarudin, Arief. (2021). Selayang Pandang Desa Kertayasa. Jakarta: Maghza Pustaka.

Amtai, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. Journal AdBisPower-STIA Saumlaki , Vol 1(1).

Arcaropeboka, R. A. (2024). EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran). Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 3(01). 10-22.

Ardiansyah, A. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Mirai Managemen, 7(2). 85-103.

Averus, A. D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (3) 585-610.

Bahri, S. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.

Bunadi. (2020). ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEBYOGKECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020. Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) , 2(2).

Burhan, L. I. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jurnal Pengabdian Sosial , 1(5).317-326.

Dakhi, R. A. (2022). Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat. Grobogan: Sarnu Untung.

Demmaraya, D. A. (2020). "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Di Era Otonomi Daerah. Journal Peqguruang, 2(2) 99-107.

Fauziah, L. A. (2020). Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2(2).

Guess, Andrew M., Brendan Nyhan, and J. R. (2019). Exposure to Untrustworthy Websites in The 2016 US Election. Nature Human Behaviour, 3.

Handono, S. (2017). Implikatur Kampanye Politik dalam Kain Rentang di Ruang Publik. Aksara.

Hasyimzoem, Y. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hermawansyah, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Good Governance, 101-116.

Hidayat, A. S. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(7). 7091-7100.

Idi, A. (2019). Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Iyengar, Shanto, and D. R. K. (2010). News That Matters: Television and American Opinion, 2nd ed. University of Chicago Press.

Junaidi, A. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid–19 Studi Lapangan Desa Beruas. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 4(1). 1-12.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Pengertian Otonomi. https://kbbi.web.id/otonomi

Khairurrosikin. (2020). Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Moyo Kabupaten Sumbawa. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.

Kulachai W, Lerdtomornsakul U, H. P. (2023). A Comprehensive Literature Review. Social Sciences., 12(9). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci12090469

Lahmuddin, L. Z. (2022). ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DI DESA PLAMPANG. Jurnal Hukum Perjuangan, 1(1).

Lili Baridi, Muhammad Zein, M. H. (2016). Zakat Dan Wirausaha. Jakarta: CED.

Lubis, S. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas di Desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-Undang Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, Nasrullah, & Indriani, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo. *Jurnal Abdimas Mandiri*, *1*(2), 1-8.

Mansyur, A. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: Balai Pustaka.

Marit, Elisabeth Lenny. (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Mas’ud. (2018). Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah.

Moeleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). Jakarta: Rosdakarya.

Mulyono, G. P. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan , Vol 7 (2). 97-107.

Neonbeni, R. V. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 4(2)115-124.

Nugraha, I. G. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. Jurnal Interpretasi Hukum , 2(3). 584-589.

Nugroho, R. (2017). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Elex Media Computindo.

Pennycook, Gordon, and D. G. R. (2019). Lazy, Not Biased: Susceptibility to Partisan Fake News Is Better Explained by Lack of Reasoning Than by Motivated Reasoning. Cognition, 188.

Prior, M. (2007). Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge University Press.

Puspa, D. F. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informas, 20(2). 281-298.

Putri, M. I. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 17(2). 72-81.

Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmah, M., & Hamdi, M. (2019). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, *1*(2), 69–84.

Raras, B. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 Di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.

Risyanti, R. dan R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Alqaprit Jatinegoro.

Riyanto, S. (2023). Optimalisasi Keahlian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Bekasi Studi Kasus Anggota BPD Di Kecamatan Tarumajaya. VERITAS, 9(2) 134-145.

Rukhmana, T. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rey Media Grafika.

Rukminto, I. A. (2015). Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rusdia, U. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4 (1) 139-153.

Saebani, B. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Setia.

Saibani, A. (2014). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Media Pustaka.

Samaun, R. B. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(1) 18-33.

Sentosa, A., Pakpahan, A., & Pratam, D. E. (2021). Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Simbolon, D. S. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2) 295-302.

Soekanto, S. (2016). Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan, M. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 5(2). 325-343.

Sofyan, M. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 5(2).325-343.

Solihin, D. (2018). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suacana, I. W. G. (2014). Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa. Denpasar: Universitas Udayana.

Sudaryono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Sugarto, E. (2015). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Suharizal, M. C. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Thafa Media.

Suharto, E. (2015). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Suparman Marzuki. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokrati. Jurnal Hukum, 15(3).

Syafi’i, A. A. (2016). Manejemen Masyarakat Islam,. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.

Syafrudin, A. (1985). Pasang Surut Otonomi Daerah. Jakarta: Bina Cipta.

Syaifudin, M. Y. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). Publika, 365-380.

Taufik, N. I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 16(1) 120-135.

Vica, L. (2022). Pelaksanaan Tugas BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021:(Studi Desa Pangkil Kabupaten Bintan). Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2(3) 173-182.

Widjaja, A. . (2013). Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widoyoko, E. . (2016). Teknik Penyusun Instrumen

Joko Mardiyanto, n.d.(2016) Peranan BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016